

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH: ALTERNATIF PENDIDIKAN KE ARAH PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Wisroni¹, Muhamad Fahrur Rozi²

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

² wisroni@fip.unp.ac.id

ABSTRACT

Education is regarded as the crucial strategy in human power because the mayor attention of educational institute is how to enable the learners as the output to do something based on their own capability. Unfortunately, the education has not had the ability to face this challengeing work. School education, based on its characteristics, is not appropriate for all people from various age. So, it is difficult for a school education to fulfill the expectation of preparing human power maximally, especially to improve countryside people. Developing non-formal educational system may be an right choice for it. The problem is that there are still many non-formal learning activities use the school approach which in turns, will not improve the people. The non-fomal learning activities that can improve people who involve in it, are those which can be applied in all program dimensions, that is having mini and homogenous groups, switching responsibilities, having leadership of learners, "outsiders" as facilitators, and democratization.

Keywords: learning material needs, interests, taklim council

PENDAHULUAN

Pembangunan meminta keterlibatan individu, keluarga dan kelompok kecil, bukan hanya terlibat di tingkat masyarakat, (Wang et al., 2018). Tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan tersebut harus dicapai dengan membangun harkat manusia dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, karena pada hakekatnya manusia berkeinginan untuk membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya berdasarkan kemampuan dan dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Penduduk merasa menguntungkan untuk memanfaatkan eksternalitas fiskal yang diciptakan oleh kepemilikan kolektif aset masyarakat untuk meningkatkan tingkat pembangunan secara keseluruhan, (Barseghyan & Coate, 2021). Masyarakat tidak terikat secara ekonomi dengan industri, penduduk tetap terlibat dalam proses perencanaan, dan ada harapan bahwa kegiatan yang diusulkan dapat menguntungkan seluruh wilayah secara ekonomi, (Bergstrom, 2019). Pembangunan partisipatif, konsensus telah dicapai bahwa pembangunan partisipatif secara keseluruhan merupakan metode penting untuk menjamin hak asasi manusia, keadilan dan kekuatan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, (Wang et al., 2018). Walaupun semua kebiasaan tersebut selama ini telah melahirkan partisipasi, akan tetapi partisipasi yang diunjuk oleh masyarakat bukanlah partisipasi yang sesungguhnya melainkan partisipasi semu. Dikatakan partisipasi semu karena apa yang mereka berikan bagi pembangunan selama ini lebih banyak unsur keterpaksaannya ketimbang unsur sukarelanya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak merangsang tumbuhnya motivasi dari dalam, tetapi menimbulkan ketergantungan. Sehingga rakyat beranggapan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah, mereka cenderung menunggu datangnya proyek pembangunan. Dengan kondisi demikian, jelas sulit untuk mengharapkan tumbuhnya partisipasi, yang merupakan kunci suksesnya pembangunan.

Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat setempat sebagai basis sumber daya penting yang dapat meningkatkan penghidupan mereka dan

mengembangkan masyarakat, Peran dan hak masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan yang penting, dapat meningkatkan persepsi dan sikap positif terhadap pencapaian tujuan konservasi, (Abukari & Mwalyosi, 2020). Lingkungan untuk memulai dengan mengubah persepsi kurangnya rasa komunitas di lingkungan dan membantu menumbuhkan rasa pemberdayaan. Memberi orang kesempatan belajar pengalaman semacam ini membangkitkan proses pengembangan kesadaran kritis yang dapat mengubah kenyataan. Proses partisipatif memungkinkan kesempatan untuk menghasilkan pengetahuan bersama di masa depan dapat meningkatkan pembelajaran dan komitmen masyarakat, (Ataov et al., 2022).

Mencermati pendapat di atas tersebut, jelaslah bahwa pemberdayaan merupakan lahannya pendidikan, bahkan tidak berlebihan kalau Abukari & Mwalyosi memandang pendidikan sebagai upaya penting dalam rangka pemberdayaan. Sayangnya dunia pendidikan sekarang belum mampu menjawab tantangan tersebut. Pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan hanya mampu bertugas melembagakan nilai-nilai kehidupan yang diragukan kegunaannya, yang hanya akan menyuburkan polarisasi sosial dan ketergantungan mental (Maunah, 2016).

Sekaitan dengan masalah tersebut, (Rahman, 2014) mengemukakan perlunya pembaharuan paradigma pendidikan, dari paradigma yang bertolak dari asumsi yang anti paedagogis sebagai akibat dari dominasi kekuasaan, kepada paradigma yang berfokus pada kepentingan: nasional dengan orientasi ke masa depan. Sedangkan menurut (Maunah, 2016) menyatakan bahwa pendidikan sebagai setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Mengingat sifatnya, sekolah memang tidak memungkinkan bagi semua orang dari berbagai usia. Kepadanya sulit diharapkan untuk proses pemberdayaan secara maksimal, karena kegiatan belajarnya yang teacher centred, dan lebih mustahil lagi untuk mengharapkan sumbangan sekolah bagi pemberdayaan masyarakat desa.

Mencermati permasalahan-permasalahan tersebut, kiranya pengembangan sistem PLS merupakan pilihan yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat desa. Berbagai alasan dapat dikemukakan, di antaranya: (1) biayanya relatif murah, karena dapat memanfaatkan segala sumber daya yang terdapat di pedesaan; (2) sasaran didiknya yang tidak dibatasi oleh usia; dan (3) sesuai dengan sifatnya, PLS memberikan otonomi yang lebih besar kepada warga belajar (Wahid, 1991b). Persoalannya berikutnya adalah masih banyaknya penyelenggaraan kegiatan belajar PLS yang selalu menggunakan pendekatan pendidikan sekolah, sehingga hanya merupakan kegiatan belajar sekolah di luar sekolah saja. Penyelenggaraan kegiatan belajar PLS yang demikian tidak akan mampu memberdayakan masyarakat desa, terutama memberdayakan warga belajarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian, Motif Berprestasi dan Proses Pemberdayaan

Kemandirian

Kemandirian merupakan keharusan dalam proses pembelajaran dewasa ini, sejauh pelajaran itu diarahkan kepada hari depan siswa, yang dengan nyata dapat dilihat dalam keluarga dan masyarakat, (Rijal & Bachtiar, 2015). Namun dalam tulisan ini dikemukakan satu rumusan yang mungkin dapat digunakan sebagai acuan. Menurut (Risnandini & Abdullah, 2017), ada lima komponen kemandirian, yaitu: (1) bebas, dalam arti tumbuhnya tindakan atas kehendak sendiri dan bukan karena orang lain, bahkan tidak tergantung kepada orang lain; (2) progresif dan ulet, seperti tampak pada usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan harapan; (3) berinisiatif, yang berarti mampu berpikir dan bertindak secara rasional, kreatif dan penuh inisiatif, (4) pengendalian diri dari dalam, adanya kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakan serta kemampuan mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri; dan (5) kemantapan diri, mencakup aspek percaya kepada diri sendiri dan memperoleh kepuasan atas usahanya sendiri.

Motif Berprestasi dan Kemandirian

Teori motif berprestasi (*need for achievement*) sebagai dorongan yang berhubungan dengan prestasi yaitu menguasai, mengatur lingkungan sosial, atau fisik, mengatasi rintangan, dan memelihara kualitas kerja yang tinggi, bersaing melebihi prestasi yang lampau dan mempengaruhi orang lain, (Ahmad et al., 2011). Melalui kemandirian yang dimilikinya, diharapkan siswa akan mengalami dan memperoleh pelajaran atas kegiatan belajarnya sendiri sebagai bekal kehidupannya baik sekarang maupun yang akan datang, (Yusuf, 2018). Dalam penelitian jangka panjang yang dilakukannya dia memperoleh kesimpulan bahwa motif berprestasi merupakan suatu hasrat untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, bukan untuk memperoleh penghargaan atau prestise, melainkan untuk memperoleh kepuasan di dalam dirinya sendiri. Berdasarkan motif tersebut, orang cenderung bekerja lebih keras, belajar lebih cepat, dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya jika pekerjaan yang diberikan kepadanya menantang prestasi.

Selanjutnya (Sidabutar et al., 2017) mengemukakan ciri-ciri orang yang memiliki motif berprestasi sebagai berikut. Pertama, berani mengambil resiko dari setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Keberanian tersebut bukan karena rasa hormatnya kepada orang yang dipercayakan pekerjaan kepadanya dan bukan pula berdasarkan spekulasi terhadap pekerjaan yang dipilihnya. Keberaniannya mengambil resiko tersebut atas dasar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Kedua, bekerja penuh semangat dan kreatif. Orang yang memiliki motif berprestasi kelihatannya hanya akan bekerja lebih keras jika pekerjaan tersebut mendatangkan prestasi pribadi atau jika kemungkinan keberhasilan pekerjaan lebih banyak tergantung kepada prestasi dan kemampuan pribadinya. Mereka juga akan bekerja keras terhadap tugas-tugas yang menuntut keahlian, kebaruan, atau pemecahan masalah.

Ketiga, memiliki tanggung jawab pribadi. Mereka merasa mampu untuk menilai keberhasilan kerjanya sendiri. Meskipun orang yang memiliki motif berprestasi mencari kepuasan dalam keberhasilan kerjanya, mereka pun bersedia menjadi tumpuan kesalahan jika pekerjaan yang dipercayakan kepadanya mengalami kegagalan. Mereka selalu percaya akan kemampuan dirinya untuk berkarya dengan lebih baik dan lebih keras untuk bersaing dengan orang lain. Seterusnya, mereka tidak begitu tertarik pada pujian orang terhadapnya, karena mereka merasa mampu untuk menilai keberhasilan kerjanya sendiri.

Keempat, mempunyai pengetahuan berkenaan dengan keberhasilan keputusan dan tindakan yang telah dipilihnya. Hal inilah yang menyebabkan dia lebih mengutamakan penilaiannya sendiri terhadap pekerjaannya. Selanjutnya karena mampu menilai pekerjaannya sendiri maka dia lebih mengutamakan mutu keberhasilan pekerjaannya.

Kelima, lebih menyenangi pekerjaan kewirausahaan. Pekerjaan yang menarik bagi mereka adalah pekerjaan yang mengandung resiko akan tetapi tentunya resiko yang dapat diperhitungkan dengan matang.

Di samping mengemukakan ciri-ciri dari motif berprestasi, penemuan terpenting dari Mc. Cleland adalah, bahwa motif berprestasi bukanlah merupakan bawaan. Latihan-latihan kemandirian dapat meningkatkan motif berprestasi. Berda-sarkan temuan Mc. Cleland tersebut dapat disimpulkan bahwa motif berprestasi, kemandirian atau keberdayaan dapat dan mungkin ditumbuh kembangkan.

Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses menghasilkan agensi kepada masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan teknologi, data, dan retorika informasi untuk membuat dan menyebarkan bukti untuk mengadvokasi perubahan sosial dan kebijakan, (Hsu et al., 2022). Secara terminologi, proses pemberdayaan berasal dari dua kata, yakni proses dan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dan partisipatif. Terakhir, keterlibatan anggota masyarakat yang kurang beruntung merupakan tantangan utama. Pemberdayaan masyarakat harus disikapi sebagai sebuah konsep yang berbeda tetapi terkait erat dengan partisipasi masyarakat, (Luisi & Hämel, 2021).

Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, proses pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk merubah seseorang atau kelompok secara perlahan dari tidak mampu menjadi mampu untuk bertindak atau melakukan sesuatu atas kekuatannya sendiri, yakni tidak tergantung kepada orang lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, atau dalam mencapai tujuannya. Partisipasi yang berkelanjutan, yang membutuhkan tingkat altruisme yang tinggi, kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu lokal, dan kemampuan diri yang memadai di antara masyarakat local, (Hsu et al., 2022)

Sebagai suatu usaha untuk memproses, pemberdayaan membutuhkan wadah untuk menumbuhkembangkannya. Wadah yang dapat digunakan untuk itu sangat banyak, yakni di mana saja manusia melakukan aktivitasnya, serta berhubungan dengan orang lain di dalam sistem sosial. Dengan kata lain, proses pemberdayaan dapat dilaksanakan di semua tempat di mana manusia melakukan aktivitasnya, seperti keluarga, kelompok kerja, lembaga pendidikan, klub-klub, dan sebagainya.

Setiap orang dalam kehidupannya selalu keluar masuk dari suatu sub sistem sosial kepada sub sistem sosial lainnya. Sayangnya tidak semua sub sistem sosial memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengemb- bangkan keberdayaannya. Selanjutnya, keberdayaan tidak dapat tumbuh secara otomatis pada seseorang atau masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu usaha, campur tangan, baik dengan menciptakan wadah yang memungkinkan ataupun dengan memperlakukan wadah yang tersedia sedemikian rupa. Usaha demikianlah yang dimaksud dengan proses pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat diperlakukan sebagai perluasan partisipasi masyarakat di dalam hormat, pemberdayaan masyarakat lebih berfokus pada kebutuhan untuk mengatasi perubahan sosial dan pergeseran kekuasaan dan kontrol atas keputusan. Pemberdayaan masyarakat dan strategi untuk mempromosikan partisipasi kelompok rentan harus dibahas dalam kebijakan mendatang, (Luisi & Hämel, 2021). Komitmen yang kuat untuk pemberdayaan, dan memiliki strategi menyeluruh untuk memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, (Ataov et al., 2022). Pemberdayaan masyarakat adalah kelompok orang yang mengerti dalam mengawasi sosial ekonomi dan tekanan-tekanan politik agar supaya mampu berkembang dan mengembangkan masyarakat, (Syamsi, 2010).

Pemberdayaan Melalui Pendidikan Luar Sekolah

Sebelum mendiskusikan proses pemberdayaan dalam PLS, perlu dikemu- kakan bahwa PLS yang dimaksudkan di sini adalah program PLS yang terprogram sedemikian rupa, seperti dalam kelompok-kelompok belajar. Pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya masyarakat adalah suatu cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggungjawab yang akan datang, dengan memaknai belajar untuk mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bersama, dan belajar menjadi seseorang secara bersamaan dan berkesinambungan, (Syamsi, 2010). Oleh karena itu PLS yang dimaksudkan di sini adalah PLS yang diprogramkan sedemikian rupa. Selanjutnya, menurut (Noor, 2011), upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek: Pertama, enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Jadi, Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada.

Pembentukan Kelompok Kecil dan Homogen

Kegiatan belajar yang memungkinkan bagi pemberdayaan warga belajar adalah kegiatan belajar yang dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan persamaan usia dan minat.

Warga belajar harus memiliki rencana yang didasarkan pada kesadaran tinggi terhadap lingkungan dan pembangunan masyarakat, bangsa dan negaranya, (Prita Kartika, 2015). Mereka memiliki kemampuan untuk belajar dalam memecahkan masalah dan berinovasi dalam mendukung kemajuan kehidupan sosial maupun ekologis yang ada disekitarnya

Mengenai jumlah anggota dalam kelompok belajar PLS, Kindervatter (1979) mengusulkan jumlah anggota kelompok dalam PLS antara 5-10 orang. Di samping jumlah anggota kelompok yang relatif kecil, perlu pula diper- timbangkan homogenitas kelompok, setidaknya dalam hal minat. Seperti telah dikemukakan, yang menjadi pertimbangan kenapa jumlah anggota kelompok perlu relatif kecil dan homogen, adalah untuk penciptaan kondisi yang kondusif agar kelompok dapat berkembang. Dengan kecil dan homogennya keanggotaan kelompok, maka relatif mudah untuk meningkatkan aktivitas, kerjasama, dan otonomi kelompok itu sendiri.

Jumlah anggota kelompok yang terbatas memungkinkan setiap anggota kelompok untuk terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok secara aktif. Diskusi kiranya mempunyai arti yang penting dalam proses pemberdayaan, karena melalui diskusi warga belajar memperoleh kesempatan untuk berlatih mengemukakan pendapatnya. Jika jumlah anggota kelompok terlalu besar, diskusi di dalam kelompok akan didominasi oleh anggota yang memang sudah mempunyai bawaan aktif.

Perlunya keanggotaan kelompok yang homogen, terutama dalam hal minat, berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar. Jika keanggotaan kelompok tidak homogen akan sulit menyatukan dan memenuhi kebutuhan dan minat belajar yang berbeda-beda di antara masing-masing anggota. Jika keadaan demikian terpaksa dilakukan berarti menghilangkan kesempatan untuk pemberdayaan bagi sebagian anggota, sebab mereka terpaksa untuk mengikuti kemauan anggota yang lebih dominan meskipun tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya. Dalam kondisi demikian akan sulit untuk menciptakan kerjasama dalam kelompok.

Pada akhirnya diharapkan terbentuknya suatu kelompok yang mampu mengurus dirinya sendiri dalam suatu bentuk kerjasama berdasarkan minat yang sama, yang pada gilirannya akan melahirkan suatu kelompok yang berotonomi.

Pengalihan Tanggung Jawab

Terdapatnya intervensi di dalam penyelenggaraan PLS tidak perlu dihindarkan, namun demikian intervensi dari orang luar haruslah bersifat sementara. Pada tahap awal orang luar dapat dan boleh saja berperan lebih aktif demi terselenggaranya pendidikan, akan tetapi demi pemberdayaan, dominasi orang luar secara bertahap harus dialihkan kepada kelompok itu sendiri. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa berarti memberdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat seimbang baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, antara hak dan kewajiban, menjadi warga negara yang bersikap dan berbuat demokratis terhadap sesama manusia menuju masyarakat yang memahami akan hak kewenangan dan tanggung jawab mereka dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, (Fitriana & Safitri Elshap, 2015).

Untuk mengatasi keadaan demikian, maka orang luar yang bertugas untuk mengelola suatu kelompok belajar secara perlahan-lahan harus mampu menurunkan statusnya. Penurunan status dalam rangka pengalihan tanggung. jawab kepada warga belajar tersebut bisa dengan cara melibatkan mereka secara aktif sejak awal perencanaan dan penyusunan program kegiatan belajar.

Kepemimpinan Warga Belajar

Dalam sistem persekolahan biasanya pendidikan diberikan oleh seorang pendidik (guru) kepada si terdidik (murid). Dalam sistem PLS kebiasaan- kebiasaan tersebut sering terbawakan. Pemberdayaan sosial akan membawa dampak pada meningkatnya akses informasi, pelayanan sosial, jaringan, dan relasi sosial, serta menghilangkan marginalisasi, (Lukman, 2021). Akibatnya kegiatan belajar terpusat kepada fasilitator, bukan kepada warga belajar itu sendiri. Selanjutnya dia melaporkan bahwa kelompok-kelompok belajar demikian tidak berumur panjang. Memperhatikan hal yang demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksanaan PLS dapat menjamin terlaksananya proses pemberdayaan.

PLS yang dapat memberdayakan warga belajarnya bukan sekadar pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah, melainkan sesuai dengan ciri khasnya, maka PLS yang dapat memberdayakan warga belajarnya adalah PLS yang setiap kegiatan belajarnya berpusat pada warga belajar. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan belajar yang berpusat kepada warga belajar, warga belajar tidak saja harus dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan belajar, tetapi mereka harus diberi kekuasaan yang besar dan luas untuk mengambil keputusan dalam segala aspek organisasi kelompok. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, (Dacholfany, 2018).

Untuk mengalihkan tanggung jawab kepada kelompok memang bukan merupakan suatu pekerjaan mudah. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, pengalihan tanggung jawab harus dilakukan secara bertahap dengan melatih warga belajar untuk bertanggung jawab terhadap segala hasil kegiatan belajarnya. Latihan tersebut pada tahap awal dapat diberikan dalam bentuk usaha menilai hasil belajar sendiri, berikutnya dengan membentuk tim-tim kerja yang terdiri dari 3 atau 4 orang dan menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pimpinan tim. Apabila sudah tiba saatnya, pemimpin kelompok diserahkan kepada salah seorang dari anggota kelompok, untuk selanjutnya orang luar hanya berperan sebagai fasilitator.

Orang Luar sebagai Fasilitator

Orang tua sebagai fasilitator saat pembelajaran online bervariasi yakni orang tua sebagai pembimbing anak, orang tua sebagai jembatan antara anak dan guru, dan orang tua sebagai penyedia fasilitas pembelajaran, (Anggraeni et al., 2021). Dalam rangka membantu proses belajar tersebut ada beberapa peran yang dapat dimainkan oleh fasilitator: 1) Membantu terciptanya suasana yang mendukung kelancaran proses belajar; 2) Membimbing proses belajar. Hal ini menyangkut bagaimana menentukan teknik-teknik belajar yang akan digunakan, mendiagnosis kebutuhan belajar. Merumuskan tujuan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar, dan menyusun rancangan kegiatan belajar; 3) Menjadi sumber belajar atau penghubung antara warga belajar dengan sumber belajar yang mereka perlukan; 4) Sebagai penilai keberhasilan belajar. Penilaian hasil belajar oleh fasilitator lebih banyak ditujukan untuk memotivasi, sebab warga belajar diharapkan mampu untuk menilai dirinya sendiri agar mereka dapat belajar dari pengalamannya sendiri; 5) Berdasarkan kemampuan warga belajar untuk menilai dirinya sendiri, jika warga belajar menghadapi kesulitan-kesulitan belajar yang tidak dapat mereka pecahkan sendiri, fasilitator dapat memberikan bantuannya.

Perlu dikemukakan bahwa orang luar sebagai fasilitator haruslah dipilih dari orang-orang yang mempunyai sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh peserta didik atau warga belajar.

Demokratisasi

Proses demokratisasi pada dasarnya berhubungan dengan penciptaan kondisi yang telah dikemukakan terdahulu, yakni berhubungan dengan persamaan hak dan kewajiban dalam kelompok. Jika terdapat perbedaan pendapat, kebutuhan ataupun minat dalam kegiatan belajar, untuk menetapkannya diputuskan melalui konsensus atau diskusi. Singkatnya, setiap pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan kelompok belajar dilakukan melalui proses demokrasi dengan cara musyawarah. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan, (Noor, 2011).

KESIMPULAN

1) Pemberdayaan adalah garapan pendidikan, di mana pengembangan sistem PLS merupakan pilihan yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat desa.; 2) Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui penciptaan wadah yang memungkinkan atau memperlakukan wadah yang tersedia sedemikian rupa; 3) Jumlah anggota kelompok belajar yang kecil dan homogen akan dapat meningkatkan aktivitas, kerjasama, dan otonomi kelompok belajar itu sendiri. Pengalihan tanggung jawab dan kepemimpinan warga belajar dapat dilakukan secara perlahan dan bertahap. Sebagai fasilitator, orang luar harus berperan sebagai orang yang membantu kelancaran proses belajar. Iklim demokratis akan

tercermin dari persamaan hak dan kewajiban setiap anggota di dalam dinamika penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar.

DAFTAR RUJUKAN

- Abukari, H., & Mwalyosi, R. B. (2020). Local Communities' Perceptions About the Impact of Protected Areas on Livelihoods and Community Development. *Global Ecology and Conservation*, 22, e00909. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e00909>
- Ahmad, S., Dhiana, P., & Warso, M. M. (2011). Pengaruh Antara Pengetahuan Kewirausahaan, Motif Berprestasi, Kemandirian Pribadi Terhadap Perilaku Kewirausahaan Pedagang Di Pasar Tegowanu. *Assembly*, 1, 8024.
- Anggraeni, R. N., Fakhriyah, F., & Ahsin, M. N. (2021). Peran orang tua sebagai fasilitator anak dalam proses pembelajaran online di rumah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 105. <https://doi.org/10.30659/pendas.8.2.105-117>
- Ataov, A., Kahraman, Z. E. H., & Osmay, S. (2022). Empowering the Community Through Participation and Action in Historic Neighbourhood Conservation Planning. *Frontiers of Architectural Research*, 11(3), 492–508. <https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.12.001>
- Barseghyan, L., & Coate, S. (2021). Community Development by Public Wealth Accumulation. *Journal of Urban Economics*, 121, 103297. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2020.103297>
- Bergstrom, R. D. (2019). Community Development in the Face of Resource Extraction in Northern Minnesota, USA. *Extractive Industries and Society*, 6(3), 831–841. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.06.007>
- Dacholfany, M. I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non Formal Di Metro Lampung (Studi Kasus Pkbm Al-Suroya). *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 02(1), Hal.45.
- Fitriana, W., & Safitri Elshap, D. (2015). Revitalisasi Peran Pendidikan Luar Sekolah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Empowerment*, 3(1), 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Hsu, Y. C., Huang, T. H., Verma, H., Mauri, A., Nourbakhsh, I., & Bozzon, A. (2022). Empowering Local Communities Using Artificial Intelligence. *Patterns*, 3(3), 100449. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2022.100449>
- Luisi, D., & Hämel, K. (2021). Community Participation and Empowerment in Primary Health Care in Emilia-Romagna: A Document Analysis Study. *Health Policy*, 125(2), 177–184. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.11.007>
- Lukman, A. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal. *DIKLUS : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1), 180–190.
- Maunah, B. (2016). Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Konflik. *CENDEKIA: Journal of Education and Teaching*, 10(2), 159–168. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v9i1.53>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Prita Kartika. (2015). Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Luar Sekolah. *Empowerment*, 4(1), 50–57.
- Rahman, F. (2014). Pendidikan untuk Perubahan Masyarakat Bermatabat. In *Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*. UNY PRESS.
- Rijal, S., & Bachtiar, S. (2015). Hubungan antara Sikap, Kemandirian Belajar, dan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Kognitif Siswa. *Jurnal Bioedukatika*, 3(2), 15. <https://doi.org/10.26555/bioedukatika.v3i2.4149>

- Risnandini, Y., & Abdullah, S. M. (2017). Kemandirian Anak Ditinjau Dari Jenis Homeschooling. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 17(1), 39. <https://doi.org/10.26486/psikologi.v17i1.683>
- Sidabutar, S. L. M., Siburian, P., & Bintang, S. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Motivasi Berprestasi Terhadap Komitmen Organisasi Guru SMP Negeri Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, 14(3), 205–216. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/tabularasa>
- Syamsi, I. (2010). Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pemberdaya Masyarakat. *Diklus*, 14(1), 66–76.
- Wang, J., Huang, X., Hu, K., & Li, X. (2018). Evaluation on Community Development Programs in Mining Industry: A Case Study of Small and Medium Enterprise in China. *Resources Policy*, 59(April), 516–524. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.09.006>
- Yusuf, A. I. (2018). Kemandirian Belajar Siswa Tunadaksa Kelas Iii Sd Negeri Margormulyo Kecamatan Pengasih Kulonprogo. *Basic Education*, 1941–1949. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/pgsd/article/view/11649%0Ahttps://journal.student.uny.ac.id/index.php/pgsd/article/download/11649/11196>.